KEPEMIMPINAN KOLABORATIF DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Nayla Fikan Azalia[1], Tazkia Nurul Amanah[2], Naily Zahrotun Nisa[3], Isni Sofia[4], Surraya Naifah[5], Nanda Alyzia Rakhmatika[6], Siswadi[7]
[1-7]UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
[1] 254110406034@mhs.uinsaizu.ac.id, [2] 254110406043@mhs.uinsaizu.ac.id , [3] 254110406029@mhs.uinsaizu.ac.id, [4] 254110406021@mhs.uinsaizu.ac.id , [5] 254110406041@mhs.uinsaizu.ac.id , [6] 254110406030@mhs.uinsaizu.ac.id , [7] siswadi@uinsaizu.ac.id

ABSTRACT

This article examines the role of collaborative leadership in fostering community participation to support educational development. Educational development is not solely the responsibility of school principals and teachers; it also requires the involvement of parents, school committees, community leaders, government institutions, and the business sector. A key concern is how educational leadership can transform community involvement from administrative and financial support into sustainable partnerships in educational planning, implementation, and evaluation. This study employs a qualitative approach using library research. Data were collected by reviewing journal articles, scholarly books, and publications related to collaborative leadership, community participation, school partnerships, and educational quality development. The analysis involved source selection, thematic categorization, critical interpretation, and conceptual synthesis. The findings indicate that collaborative leadership can strengthen community participation through two-way communication, stakeholder involvement in decision-making, shared responsibilities, transparent program management, and joint evaluation. Community participation can also broaden support for learning resources, character development, students' skills, and the sustainability of school programs. Therefore, collaborative leadership should be understood as a process of building trust and shared responsibility rather than merely mobilizing community contributions for educational institutions. This approach positions the community as an active partner in developing responsive, inclusive, and sustainable education.

Keywords: *collaborative leadership, community participation, educational partnership, educational development, educational quality.*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan kolaboratif dalam membangun partisipasi masyarakat untuk mendukung pengembangan pendidikan. Pengembangan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru, tetapi juga memerlukan keterlibatan orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, pemerintah, serta dunia usaha. Permasalahan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kepemimpinan pendidikan mampu mengubah keterlibatan masyarakat dari sekadar dukungan administratif dan finansial menjadi kemitraan yang berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi

pustaka. Data diperoleh melalui penelaahan artikel jurnal, buku ilmiah, dan publikasi yang relevan dengan kepemimpinan kolaboratif, partisipasi masyarakat, kemitraan sekolah, serta pengembangan mutu pendidikan. Analisis dilakukan melalui seleksi sumber, pengelompokan tema, interpretasi kritis, dan sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif dapat memperkuat partisipasi masyarakat melalui komunikasi dua arah, pelibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, transparansi pengelolaan program, dan evaluasi bersama. Partisipasi masyarakat juga berpotensi memperluas dukungan terhadap sumber belajar, penguatan karakter, pengembangan keterampilan peserta didik, dan keberlanjutan program sekolah. Dengan demikian, kepemimpinan kolaboratif perlu dipahami sebagai proses membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama, bukan sekadar menggalang bantuan masyarakat bagi lembaga pendidikan.

Kata kunci: kepemimpinan kolaboratif, partisipasi masyarakat, kemitraan pendidikan, pengembangan pendidikan, mutu pendidikan.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang pelaksanaannya tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Sekolah memang memiliki kewenangan dalam mengelola pembelajaran dan program kelembagaan, tetapi keberhasilan pendidikan turut dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, kondisi sosial masyarakat, dukungan kebijakan, dan ketersediaan sumber daya. Karena itu, pengembangan pendidikan membutuhkan hubungan yang produktif antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Hubungan tersebut tidak cukup dibangun melalui pertemuan formal atau kegiatan insidental, melainkan perlu diarahkan pada kemitraan yang memungkinkan setiap pihak berkontribusi sesuai kapasitas dan tanggung jawabnya.

Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali dipahami secara terbatas sebagai keterlibatan orang tua dalam rapat sekolah, pemberian bantuan dana, penyediaan fasilitas, atau kehadiran dalam kegiatan tertentu. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut tetap penting, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Masyarakat juga memiliki pengetahuan, pengalaman, jaringan sosial, keterampilan profesional, dan sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pembelajaran serta menjawab kebutuhan peserta didik. Persoalannya terletak pada

kemampuan sekolah membangun mekanisme kerja sama yang memungkinkan potensi tersebut terhubung dengan tujuan pendidikan.

Pada titik ini, kepemimpinan pendidikan memegang peranan penting. Kepala sekolah tidak hanya bertugas mengarahkan guru dan mengelola administrasi kelembagaan, tetapi juga perlu membangun hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan. Kasmawati (2021) menjelaskan pentingnya kepemimpinan kolaboratif bagi sekolah dalam menghadapi perubahan lingkungan organisasi. Kepemimpinan kolaboratif menempatkan komunikasi, kerja sama, dan keterlibatan anggota sebagai bagian dari proses mencapai tujuan bersama. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan pendidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan pemimpin mengambil keputusan, tetapi juga pada kemampuannya membangun kesepahaman dan menggerakkan sumber daya kolektif.

Kepemimpinan kolaboratif berbeda dari pola kepemimpinan yang hanya berorientasi pada instruksi. Dalam pola kolaboratif, pemimpin tetap memiliki tanggung jawab atas arah dan keputusan strategis, tetapi membuka ruang bagi guru, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, mengusulkan program, serta memberikan evaluasi. Keterlibatan tersebut harus disertai kejelasan peran dan mekanisme pengambilan keputusan. Tanpa pengaturan yang memadai, kolaborasi berisiko berhenti sebagai slogan atau hanya melibatkan kelompok masyarakat yang memiliki kedekatan dengan pihak sekolah.

Kajian Siswadi (2023) tentang Islamic humble leadership dalam mempertahankan mutu pendidikan madrasah memberikan perspektif bahwa kepemimpinan pendidikan perlu memperhatikan hubungan pemimpin dengan lingkungan organisasi dan nilai-nilai yang mendasari praktik kepemimpinannya. Selanjutnya, pembahasan Siswadi (2024) mengenai kepemimpinan pendidikan adaptif menegaskan relevansi kemampuan pemimpin dalam merespons perubahan. Kedua perspektif tersebut dapat digunakan untuk memahami bahwa partisipasi masyarakat membutuhkan pemimpin yang terbuka terhadap masukan, mampu membaca kebutuhan

lingkungan, dan bersedia menyesuaikan strategi pengembangan pendidikan.

Selain itu, kepemimpinan kolaboratif berkaitan erat dengan modal sosial, terutama kepercayaan, norma timbal balik, dan jaringan hubungan antaraktor. Modal sosial memungkinkan hubungan sekolah dengan masyarakat berkembang dari interaksi formal menjadi kerja sama yang memiliki tujuan bersama. Kajian Siswadi dan kolega (2026) tentang kepemimpinan berbasis modal sosial dalam membangun budaya mutu pendidikan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi internal, pelibatan orang tua, penguatan komite sekolah, serta pengembangan kemitraan eksternal. Perspektif ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar tambahan bagi program sekolah, melainkan salah satu sumber daya sosial yang dapat memperkuat pengembangan mutu pendidikan.

Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat tidak selalu berjalan secara optimal. Sebagian orang tua memiliki keterbatasan waktu, kemampuan ekonomi, atau akses komunikasi. Di sisi lain, sekolah mungkin belum menyediakan saluran partisipasi yang memadai, belum menyampaikan informasi program secara terbuka, atau masih menempatkan masyarakat sebagai penerima keputusan. Perbedaan kepentingan antara sekolah dan masyarakat juga dapat memengaruhi keberlangsungan kemitraan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa rendah atau tingginya partisipasi tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan kemauan masyarakat, tetapi juga perlu dilihat dari cara kepemimpinan sekolah membuka akses, membangun kepercayaan, dan mengelola hubungan kerja sama.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini berfokus pada tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kepemimpinan kolaboratif membangun partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan? Kedua, bentuk partisipasi apa saja yang dapat dikembangkan melalui kemitraan sekolah dan masyarakat? Ketiga, kondisi apa yang mendukung atau menghambat keberlanjutan kolaborasi tersebut? Pembahasan diarahkan untuk merumuskan kerangka konseptual yang menghubungkan praktik kepemimpinan, mekanisme

partisipasi, dan pengembangan pendidikan.

Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dengan menempatkan kepemimpinan kolaboratif sebagai mekanisme penghubung antara potensi masyarakat dan kebutuhan pengembangan pendidikan. Kontribusi tersebut terletak pada penjelasan mengenai proses membangun kepercayaan, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mengatur pembagian tanggung jawab, serta memastikan bahwa partisipasi memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan pendidikan. Dengan demikian, pembahasan tidak berhenti pada anjuran agar masyarakat terlibat, tetapi menguraikan bagaimana keterlibatan tersebut dapat dikelola secara terarah dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena tujuan artikel adalah menganalisis konsep kepemimpinan kolaboratif, partisipasi masyarakat, dan pengembangan pendidikan melalui sintesis literatur, bukan mengukur pengaruh suatu variabel atau melaporkan temuan lapangan. Sumber kajian mencakup artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan publikasi yang membahas kepemimpinan pendidikan, kemitraan sekolah dengan masyarakat, partisipasi orang tua, modal sosial, serta pengembangan mutu pendidikan.

Penelusuran literatur diarahkan pada publikasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Prioritas diberikan kepada artikel yang membahas kepemimpinan kolaboratif, kepemimpinan pendidikan adaptif, hubungan sekolah dengan keluarga dan masyarakat, serta pengembangan jaringan kemitraan. Publikasi Siswadi dari tahun 2023–2026 digunakan sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan kepemimpinan pendidikan, dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian substansi dan ketepatan metadata bibliografis. Literatur lain digunakan untuk memperluas landasan konseptual dan mempertemukan perspektif kepemimpinan dengan teori partisipasi serta kemitraan pendidikan.

Analisis dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, seleksi literatur, yaitu memilih sumber berdasarkan relevansinya dengan pertanyaan kajian. Kedua, pengelompokan tema, meliputi karakteristik kepemimpinan kolaboratif, bentuk partisipasi masyarakat, mekanisme kemitraan, faktor pendukung, dan hambatan pelaksanaan. Ketiga, interpretasi kritis, yakni membandingkan gagasan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasinya bagi pengelolaan pendidikan. Keempat, sintesis konseptual, yaitu menyusun hubungan antara praktik kepemimpinan, proses partisipasi, dan tujuan pengembangan pendidikan.

Untuk menjaga ketepatan analisis, literatur konseptual dibedakan dari hasil penelitian empiris yang dilaporkan oleh penulis sumber. Kesimpulan artikel disusun berdasarkan pola pemikiran dan hubungan konseptual yang ditemukan dalam literatur, bukan berdasarkan wawancara atau observasi yang tidak dilakukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, hasil yang disajikan merupakan sintesis kajian pustaka dan tidak diklaim sebagai temuan lapangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kepemimpinan Kolaboratif sebagai Penggerak Partisipasi Masyarakat

Kepemimpinan kolaboratif dapat dipahami sebagai proses memengaruhi, mengoordinasikan, dan menggerakkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama melalui komunikasi terbuka, pembagian tanggung jawab, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini menempatkan kepala sekolah sebagai pengarah kolaborasi yang menghubungkan kebutuhan peserta didik, kapasitas guru, dukungan keluarga, dan potensi lingkungan masyarakat.

Peran kepala sekolah dalam pola ini tidak hilang, tetapi mengalami perluasan. Kepala sekolah tetap menetapkan prioritas, menjaga mutu program, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pendidikan. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman pihak-pihak yang terlibat.

Kasmawati (2021) menempatkan kepemimpinan kolaboratif sebagai pendekatan yang relevan bagi sekolah dalam menghadapi perubahan. Relevansinya terlihat ketika keputusan pendidikan memerlukan informasi dari berbagai pihak dan tidak cukup diselesaikan melalui instruksi sepihak.

Kolaborasi yang efektif memerlukan tujuan yang dipahami bersama. Sekolah perlu menjelaskan persoalan yang hendak diselesaikan, manfaat program, bentuk kontribusi yang dibutuhkan, dan batas tanggung jawab masing-masing pihak. Sebagai contoh, ketika sekolah mengembangkan program literasi, kepala sekolah dapat mengajak guru mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, orang tua mendukung kebiasaan membaca di rumah, perpustakaan atau komunitas literasi menyediakan sumber bacaan, dan pemerintah setempat mendukung penguatan fasilitas sesuai kewenangannya. Pembagian peran tersebut membuat partisipasi lebih terarah daripada sekadar meminta masyarakat membantu kegiatan sekolah.

Pemikiran Siswadi (2023) tentang Islamic humble leadership juga relevan untuk menelaah dimensi relasional kepemimpinan. Kerendahan hati dalam kepemimpinan dapat diterjemahkan ke dalam kesediaan mendengar, mengakui kontribusi pihak lain, dan menerima masukan yang berguna bagi perbaikan program. Dalam kemitraan pendidikan, sikap tersebut penting karena masyarakat tidak selalu memiliki kedudukan, sumber daya, atau tingkat pendidikan yang sama. Pemimpin perlu memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak menjadi alasan untuk membatasi kesempatan berpartisipasi.

Dengan demikian, kepemimpinan kolaboratif bekerja melalui dua fungsi yang saling berkaitan. Fungsi pertama adalah menentukan arah, yaitu memastikan partisipasi masyarakat mendukung tujuan pendidikan. Fungsi kedua adalah membangun hubungan, yaitu menciptakan kepercayaan dan ruang keterlibatan yang memungkinkan masyarakat berkontribusi. Apabila hanya fungsi pertama yang dijalankan, kepemimpinan berpotensi menjadi terlalu administratif. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan hubungan baik tanpa tujuan dan pembagian tanggung jawab yang jelas, kolaborasi

dapat berlangsung tanpa arah yang terukur.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan

Partisipasi masyarakat perlu dipahami secara lebih luas daripada pemberian bantuan material. Dalam pengembangan pendidikan, keterlibatan masyarakat setidaknya dapat dikembangkan melalui empat bentuk yang saling melengkapi.

Pertama, partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Orang tua, komite sekolah, dan unsur masyarakat dapat dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas program, dan pembahasan solusi. Keterlibatan tersebut tidak berarti seluruh keputusan harus ditentukan melalui kesepakatan semua pihak. Sekolah tetap bertanggung jawab terhadap keputusan profesional dan kebijakan kelembagaan, tetapi prosesnya perlu memberi ruang bagi masukan yang relevan. Pelibatan sejak tahap perencanaan juga membantu mengurangi kesenjangan antara program yang dirancang sekolah dan kebutuhan nyata peserta didik.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan program pendidikan. Masyarakat dapat berkontribusi melalui pendampingan belajar, penyediaan pengalaman praktis, kegiatan literasi, penguatan keterampilan, pengenalan profesi, pelestarian budaya lokal, dan kegiatan pembentukan karakter. Dunia usaha dapat membantu memperkenalkan lingkungan kerja dan keterampilan yang dibutuhkan, sedangkan komunitas lokal dapat menjadi sumber pembelajaran kontekstual. Bentuk partisipasi ini perlu dirancang berdasarkan kebutuhan kurikulum, keselamatan peserta didik, dan kemampuan pihak yang terlibat.

Ketiga, partisipasi dalam penyediaan sumber daya. Sumber daya tidak terbatas pada dana, tetapi juga mencakup waktu, keahlian, jaringan profesional, fasilitas, bahan pembelajaran, dan pengetahuan lokal. Penekanan pada beragam bentuk kontribusi penting agar partisipasi tidak diukur berdasarkan kemampuan ekonomi semata. Keluarga yang tidak dapat memberikan bantuan finansial tetap dapat berpartisipasi melalui komunikasi dengan guru, pendampingan belajar, atau dukungan terhadap kebiasaan belajar anak.

Keempat, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi. Masyarakat dapat menyampaikan umpan balik mengenai pelaksanaan program, akses terhadap layanan pendidikan, komunikasi sekolah, serta kebutuhan peserta didik. Informasi tersebut dapat digunakan sekolah untuk memperbaiki program dan menjelaskan penggunaan sumber daya secara transparan. Evaluasi bersama juga memberikan dasar bagi masyarakat untuk memahami manfaat program dan menentukan bentuk dukungan yang lebih sesuai pada periode berikutnya.

Keempat bentuk tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki dimensi perencanaan, pelaksanaan, dukungan sumber daya, dan evaluasi. Keberhasilan kepemimpinan kolaboratif terletak pada kemampuannya menghubungkan keempat dimensi tersebut sebagai proses yang berkesinambungan. Masyarakat bukan sekadar pihak yang diminta membantu setelah keputusan dibuat, melainkan mitra yang dapat memberikan masukan sejak penentuan kebutuhan sampai penilaian hasil program.

3. Modal Sosial, Kepercayaan, dan Keberlanjutan Kemitraan

Partisipasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kualitas hubungan sosial yang dibangun sekolah. Hubungan yang ditandai kepercayaan, keterbukaan informasi, dan penghargaan terhadap kontribusi pihak lain akan lebih memungkinkan terbentuknya kemitraan yang berkelanjutan. Sebaliknya, komunikasi yang hanya berlangsung ketika sekolah membutuhkan bantuan berisiko membuat masyarakat memandang hubungan tersebut sebagai hubungan transaksional.

Modal sosial membantu menjelaskan mekanisme tersebut. Kepercayaan mengurangi keraguan masyarakat terhadap tujuan program, norma timbal balik mendorong kesediaan untuk saling mendukung, sedangkan jaringan sosial memperluas akses sekolah terhadap pengetahuan dan sumber daya. Dalam konteks pendidikan, modal sosial dapat dibangun melalui komunikasi rutin, forum konsultasi, pelaksanaan program bersama, dan penyampaian informasi mengenai hasil serta kendala kegiatan.

Kajian Siswadi dan kolega (2026) mengenai strategi kepemimpinan

berbasis modal sosial menempatkan keterlibatan orang tua, penguatan peran komite sekolah, dan kemitraan eksternal sebagai bagian dari strategi membangun budaya mutu. Kerangka ini relevan karena mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses internal sekolah, tetapi juga oleh kemampuan lembaga membangun hubungan produktif dengan lingkungan sosialnya. Meski demikian, keberadaan jaringan sosial saja tidak otomatis menghasilkan mutu yang lebih baik. Hubungan tersebut perlu diarahkan pada tujuan yang jelas dan disertai mekanisme pertanggungjawaban.

Kepemimpinan adaptif juga diperlukan ketika kebutuhan masyarakat berubah. Siswadi (2024), melalui pembahasan tentang problematika kepemimpinan pendidikan adaptif di era digital, memberikan landasan untuk memahami pentingnya kemampuan pemimpin merespons perubahan lingkungan. Dalam konteks partisipasi, kemampuan adaptif dapat diwujudkan melalui pemanfaatan saluran komunikasi digital, penyediaan waktu konsultasi yang fleksibel, serta penyampaian informasi dalam format yang mudah diakses. Namun, penggunaan teknologi harus tetap mempertimbangkan keluarga yang memiliki keterbatasan akses internet atau perangkat. Oleh karena itu, komunikasi digital sebaiknya melengkapi, bukan sepenuhnya menggantikan, komunikasi langsung.

Keberlanjutan kemitraan juga bergantung pada apakah masyarakat dapat melihat hubungan antara kontribusinya dan kebutuhan pendidikan. Sekolah perlu memberikan penjelasan mengenai tujuan program, perkembangan pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta tindak lanjut berdasarkan masukan yang diterima. Transparansi semacam ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi juga menyangkut proses pengambilan keputusan dan pertimbangan dalam menentukan prioritas. Dengan cara tersebut, kepercayaan dibangun melalui praktik yang dapat diamati, bukan semata-mata melalui ajakan atau pernyataan normatif.

4. Strategi Kepemimpinan untuk Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat

Pengembangan partisipasi masyarakat membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan kondisi lembaga pendidikan dan karakteristik

lingkungan. Berdasarkan sintesis literatur, terdapat lima strategi yang dapat digunakan.

Pertama, memetakan kebutuhan pendidikan dan potensi masyarakat. Sekolah perlu mengetahui persoalan prioritas, sumber daya yang tersedia, serta pihak yang berpotensi mendukung program. Pemetaan ini menghindarkan sekolah dari kegiatan kemitraan yang hanya mengikuti kebiasaan tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Pemetaan juga membantu sekolah mengidentifikasi kelompok yang selama ini kurang terlibat.

Kedua, membangun forum komunikasi yang inklusif. Pertemuan sekolah dan orang tua sebaiknya tidak hanya digunakan untuk menyampaikan keputusan, tetapi juga untuk mendiskusikan persoalan dan mencari alternatif penyelesaian. Sekolah dapat mengombinasikan rapat formal, konsultasi kelompok kecil, survei kebutuhan, dan saluran komunikasi digital. Agar inklusif, mekanisme komunikasi perlu mempertimbangkan waktu, akses, bahasa, dan kemampuan masyarakat yang beragam.

Ketiga, membagi peran dan tanggung jawab secara jelas. Setiap program perlu memiliki tujuan, pihak yang bertanggung jawab, bentuk kontribusi, jadwal, dan mekanisme evaluasi. Pembagian tanggung jawab mencegah terjadinya ketergantungan pada satu pihak atau pengalihan tanggung jawab sekolah kepada masyarakat. Kemitraan harus memperkuat penyelenggaraan pendidikan, bukan menggantikan kewajiban institusi dalam menyediakan layanan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Keempat, mengembangkan program bersama yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kegiatan kemitraan sebaiknya menghasilkan manfaat pendidikan yang jelas, misalnya peningkatan kebiasaan membaca, penguatan keterampilan, pembelajaran berbasis lingkungan, pendampingan peserta didik, atau pengenalan dunia kerja. Program yang memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan peserta didik lebih mudah dipahami masyarakat dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk mempertahankan partisipasi.

Kelima, melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut secara terbuka. Evaluasi tidak cukup dilakukan dengan menghitung jumlah kegiatan

atau kehadiran masyarakat. Sekolah perlu menilai kesesuaian program dengan kebutuhan, kualitas keterlibatan, manfaat yang dirasakan peserta didik, serta kendala yang muncul. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pembagian peran pada kegiatan berikutnya.

Kelima strategi tersebut membentuk suatu siklus: pemetaan kebutuhan, komunikasi, pembagian peran, pelaksanaan program, dan evaluasi. Siklus ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan kolaboratif bukan kegiatan sesaat, melainkan proses pengelolaan hubungan yang terus diperbaiki. Pada tahap inilah kemampuan pemimpin mengintegrasikan tujuan pendidikan dengan potensi masyarakat menjadi penentu penting bagi keberlanjutan kemitraan.

5. Hambatan Partisipasi dan Implikasinya bagi Pengembangan Pendidikan

Partisipasi masyarakat tidak selalu berkembang sesuai harapan. Salah satu hambatan yang sering muncul dalam hubungan sekolah dan masyarakat adalah ketimpangan akses terhadap proses pengambilan keputusan. Orang tua yang memiliki waktu, pendidikan, atau kedekatan lebih besar dengan sekolah cenderung lebih mudah menyampaikan pendapat, sedangkan kelompok lain berpotensi tidak terwakili. Jika kondisi ini dibiarkan, kolaborasi dapat menjadi eksklusif dan hanya mencerminkan kepentingan sebagian masyarakat.

Hambatan berikutnya adalah perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab pendidikan. Sekolah dapat mengharapkan dukungan masyarakat yang lebih luas, sementara orang tua memandang tugas pendidikan formal sebagai tanggung jawab utama sekolah. Perbedaan ini perlu dijembatani melalui penjelasan mengenai batas tanggung jawab masing-masing pihak. Pelibatan masyarakat tidak boleh digunakan untuk memindahkan beban pembiayaan atau kewajiban pelayanan pendidikan kepada keluarga. Sebaliknya, kemitraan harus memperkuat dukungan terhadap proses pendidikan tanpa mengurangi tanggung jawab institusi.

Keterbatasan sumber daya juga memengaruhi keberlanjutan kolaborasi. Tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan ekonomi, waktu, atau keahlian yang sama.

Karena itu, pemimpin pendidikan perlu menyediakan bentuk partisipasi yang beragam dan tidak menjadikan kontribusi finansial sebagai ukuran utama kepedulian. Masyarakat dapat terlibat melalui pendampingan, pemberian masukan, penyediaan pengetahuan lokal, atau dukungan terhadap lingkungan belajar yang kondusif.

Selain itu, kurangnya transparansi dapat melemahkan kepercayaan. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi mengenai tujuan kegiatan, proses pelaksanaan, dan hasil program, mereka akan kesulitan menilai manfaat partisipasinya. Dalam keadaan demikian, partisipasi berisiko bersifat formal dan hanya muncul ketika sekolah meminta bantuan. Untuk mengatasinya, kepala sekolah perlu membangun komunikasi yang konsisten, menyampaikan laporan program secara proporsional, dan memberikan tanggapan atas masukan masyarakat.

Implikasinya, kepemimpinan kolaboratif harus berorientasi pada keadilan partisipasi. Pemimpin tidak cukup membuka forum pertemuan, tetapi perlu memastikan bahwa berbagai kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang wajar untuk menyampaikan pandangan. Pemimpin juga harus mengelola perbedaan pendapat secara terbuka, menghindari dominasi kelompok tertentu, dan memastikan bahwa keputusan tetap mengutamakan kepentingan pendidikan. Dengan demikian, kualitas kolaborasi ditentukan bukan hanya oleh banyaknya pihak yang hadir, tetapi juga oleh kualitas keterlibatan dan pengaruh yang dimiliki para pihak terhadap perbaikan program.

6. Kerangka Konseptual Kepemimpinan Kolaboratif dalam Pengembangan Pendidikan

Berdasarkan sintesis pembahasan, kepemimpinan kolaboratif dapat dijelaskan melalui hubungan antara kapasitas pemimpin, mekanisme partisipasi, dan tujuan pengembangan pendidikan. Kapasitas pemimpin mencakup keterbukaan, kemampuan komunikasi, kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, dan kemampuan mengelola perbedaan kepentingan. Kapasitas tersebut menjadi dasar untuk membangun kepercayaan dan menyusun mekanisme kemitraan.

Mekanisme partisipasi diwujudkan melalui keterlibatan

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, penyediaan sumber daya, dan evaluasi program. Keempat bentuk keterlibatan ini perlu terhubung satu sama lain agar partisipasi tidak berhenti pada satu kegiatan. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki perencanaan, sedangkan pengalaman pelaksanaan menjadi dasar dalam menyesuaikan pembagian tanggung jawab.

Adapun pengembangan pendidikan menjadi tujuan yang hendak dicapai melalui kemitraan tersebut. Tujuan ini dapat mencakup perbaikan lingkungan belajar, penguatan relevansi pembelajaran dengan kehidupan masyarakat, pengembangan karakter dan keterampilan peserta didik, serta peningkatan mutu layanan pendidikan. Pencapaian tujuan tersebut tidak berlangsung secara otomatis, sebab tetap dipengaruhi oleh kualitas program, ketersediaan sumber daya, kebijakan pendidikan, dan kondisi sosial setempat.

Secara konseptual, hubungan antarkomponen dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kapasitas Kepemimpinan Kolaboratif
Keterbukaan, komunikasi, kepercayaan, dan pengelolaan perbedaan
↓
Mekanisme Partisipasi Masyarakat
Perencanaan bersama • Pelaksanaan program • Dukungan sumber daya • Evaluasi Bersama
↓
Pengembangan Pendidikan
Lingkungan belajar yang lebih baik, pembelajaran kontekstual, penguatan karakter, dan peningkatan mutu layanan
↓
Evaluasi dan umpan balik masyarakat menjadi dasar perbaikan kepemimpinan serta perencanaan program berikutnya.

Kerangka tersebut merupakan hasil sintesis konseptual dari kajian pustaka, bukan model yang telah diuji melalui penelitian lapangan. Nilai pentingnya terletak pada penjelasan bahwa kepemimpinan dan partisipasi masyarakat tidak berdiri sendiri. Kepemimpinan menyediakan arah, struktur, dan ruang keterlibatan; masyarakat membawa pengetahuan, dukungan, serta sumber daya; sedangkan evaluasi menjaga agar

hubungan keduanya tetap relevan dengan kebutuhan pendidikan.

Kerangka ini juga menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya program kemitraan. Hal yang lebih penting adalah apakah masyarakat terlibat secara bermakna, apakah tanggung jawab dibagi secara wajar, dan apakah kontribusi tersebut mendukung kebutuhan peserta didik. Dengan orientasi tersebut, kepemimpinan kolaboratif dapat menjadi pendekatan untuk membangun hubungan sekolah dan masyarakat yang lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Kepemimpinan kolaboratif berperan penting dalam membangun partisipasi masyarakat untuk pengembangan pendidikan karena menghubungkan kebutuhan sekolah dengan potensi keluarga, komite sekolah, komunitas, pemerintah, dan dunia usaha. Peran pemimpin tidak hanya mengarahkan program, tetapi juga membangun kepercayaan, membuka komunikasi dua arah, mengatur pembagian tanggung jawab, dan memastikan keterlibatan masyarakat berjalan sesuai tujuan pendidikan.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui perencanaan bersama, pelaksanaan program, dukungan sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi. Bentuk keterlibatan tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masyarakat agar tidak terbatas pada bantuan finansial. Keberlanjutan kolaborasi bergantung pada keterbukaan informasi, relevansi program, kejelasan peran, kesempatan berpartisipasi yang adil, dan tindak lanjut atas masukan yang diberikan.

Artikel ini menawarkan kerangka konseptual yang menghubungkan kapasitas kepemimpinan kolaboratif, mekanisme partisipasi, dan pengembangan pendidikan dalam suatu siklus perbaikan berkelanjutan. Implikasinya, kepala sekolah perlu memosisikan masyarakat sebagai mitra dalam pengembangan pendidikan, bukan sekadar penerima informasi atau penyedia bantuan. Karena kajian ini menggunakan studi pustaka, kerangka tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian empiris pada berbagai jenis dan konteks lembaga pendidikan

untuk mengetahui bagaimana penerapannya berlangsung serta kondisi yang memengaruhi keberhasilannya.

DAFTAR PUSTAKA

Bryk, A. S., & Schneider, B. (2002). Trust in schools: A core resource for improvement. Russell Sage Foundation.

Bush, T. (2020). Theories of educational leadership and management (5th ed.). SAGE Publications.

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, S95–S120. https://doi.org/10.1086/228943

Epstein, J. L. (2011). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools (2nd ed.). Westview Press.

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4th ed.). Teachers College Press.

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). Professional capital: Transforming teaching in every school. Teachers College Press.

Ishimaru, A. M. (2019). Just schools: Building equitable collaborations with families and communities. Teachers College Press.

Kasmawati, Y. (2021). Kepemimpinan kolaboratif: Sebuah bentuk kepemimpinan untuk sekolah. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 9(2). https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i2.5120

Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 40(1), 5–22. https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1596077

OECD. (2019). Providing quality early childhood education and care: Results from the Starting Strong Survey 2018. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/301005d1-en

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.

Sanders, M. G. (2006). Building school-community partnerships: Collaboration for student success. Corwin Press.

Siswadi. (2023). Islamic humble leadership in sustaining education quality at Madrasa. Journal of Namibian Studies: History Politics Culture, 34(6), 2889–2911.

Siswadi. (2024). Mengurai problematika masa depan kepemimpinan pendidikan adaptif di era digital. PENDAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(2), 200–210.

Siswadi, S., Asdlori, & Masruri, M. (2026). Faith-based transformational leadership in the digital age: A case study of social media-driven educational fundraising for orphans in Indonesia. Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 9(1), 246–

265. https://doi.org/10.31538/nzh.v9i1.221

Siswadi, S., Afandi, R., Mukroji, M., Sulistyawan, G. D., & Sofati, S. (2026). Strategi kepemimpinan berbasis modal sosial dalam membangun budaya mutu pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan, 11(1), 1450–1456. https://doi.org/10.34125/jmp.v11i1.1945

Spillane, J. P. (2006). Distributed leadership. Jossey-Bass.

UNESCO. (2017). A guide for ensuring inclusion and equity in education. UNESCO.

Warren, M. R., Hong, S., Rubin, C. L., & Uy, P. S. (2009). Beyond the bake sale: A community-based relational approach to parent engagement in schools. Teachers College Record, 111(9), 2209–2254.